













Adapun terdapat rukun dan syarat jual beli menurut Imam Syafi'i, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli, Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual adalah Islam, dewasa atau sadar, pembeli ataupun penjual harus baligh, berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* (belum baligh) dipandang belum sah, tidak dipaksa dengan cara yang tidak benar maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa. Pembeli bukan musuh, umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh.
- b. *Ijāb* dan *qabūl* (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli). Sedangkan, Syarat *Ṣīghat* (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan) yakni Berhadap-hadapan antara pembeli dan penjual harus menunjukkan *ṣīghat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya harus sesuai dengan orang yang dituju, ditujukan kepada badan yang akad. *Ijāb* dan *qabul* tidak terpisah, antara *ijāb* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah *lafāz*, *lafāz* *ijāb* tidak boleh berubah, seperti seperti perkataan “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*”, bersesuaian antara *ijāb* dan *qabul* secara sempurna, tidak dikaitkan dengan















































b. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qoyyim membagi *al-dharī'ah* menjadi empat, yaitu:

1. *al-dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
2. *al-dharī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhallil, atau tidak sengaja mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi haram tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.
3. *al-dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaannya menjadi lain.
4. *al-dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil







Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Usman, “Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari’ah”, dalam [http://www.halalmui.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halalberprinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en](http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halalberprinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en) (9 Juli 2015).